

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yakni guna mencari tahu bagaimana kebijakan hukum pidana atas sanksi denda terkait tindak pidana narkoba. Adapun rumusan masalah pada penulisan ini, yaitu: 1) Bagaimana pengaturan terhadap sanksi denda dalam tindak pidana narkoba, dan 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap sanksi denda pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Pada penulisan skripsi ini, metode penelitian yang penulis terapkan yakni yuridis normatif, yang melibatkan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang penulis pergunakan yakni Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, serta Bahan Hukum Tersier. Hasil dari penelitian pada skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa 1) Pidana denda yang diputuskan oleh pengadilan atas terpidana Narkoba tidak bisa dilangsungkan atau dieksekusi. Secara spesifik, terpidana Narkoba seluruhnya tidak perlu membayarkan denda, melainkan menggantinya dengan hukuman penjara alternatif, sebab besaran denda minimum yang dituangkan pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dianggap terlalu tinggi bahkan tidak masuk akal. Dalam upaya memperbaharui peraturan hukum pidana sehubungan dengan penegakan sanksi pidana denda terhadap kejahatan Narkoba, terdapat dua solusi yang diajukan, yakni konfiskasi harta kekayaan atau pendapatan dari terpidana, serta revisi tata cara pelaksanaan pidana denda dalam kerangka UU Narkoba.

Kata Kunci: Narkoba, Sanksi Denda, Kebijakan Hukum Pidana.

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the criminal law policy regarding fines in cases of narcotics offenses. The research questions formulated are: 1) What are the regulations concerning fine sanctions for narcotics crimes? and 2) What is the stance of criminal law policy regarding fines as outlined in Law Number 35 of 2009 concerning narcotics? In conducting this thesis, the author employed a normative juridical research method, utilizing statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials utilized encompass Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials, and Tertiary Legal Materials. The findings of this research are twofold: 1) Fines imposed by the court on convicted narcotics offenders are not effectively enforced; instead, convicts opt for substitute imprisonment due to excessively high and often irrational minimum fines stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. 2) To reform the criminal law pertaining to the formulation policy of fines in narcotics crime enforcement, two solutions are proposed: seizing assets or income from convicts and reforming the procedures for executing criminal fines under the Narcotics Law.

Keywords: *Narcotics, Fine Sanction, Criminal Law Policy.*